REALITAS KOMPETENSI GURU PASCA SERTIFIKASI

Fitria Nur Anggranei
Universitas Muhammadiyah Jakarta
hafidz@gmail.com

Submitted: 24th May 2020/ **Edited:** 04th August 2020/ **Issued:** 01st October 2020
Cited on: Anggraeni, F. N. (2020). REALITAS KOMPETENSI GURU PASCA SERTIFIKASI. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 331-340.
DOI: 10.5281/zenodo.4128529
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4128529>

ABSTRACT

The world of education in Indonesia cannot be proud of itself, many international reports show the level of education in the middle category (for example UNDP & GTCD). In fact, this concern is bigger when looking at the facts on the ground, how many problems and shortages in Indonesian education are, and the most terrible thing is the quality of the teaching force. This study seeks to show evidence, how to portray the competence of educators in Indonesia. Can a certification program increase the knowledge and abilities of educators? This is the main topic of research. So that we can see, to what extent are the roles of the government, the ministry of education, the schools, and the teachers themselves, trying to improve their professionalism, so as to make a real contribution to realizing a smart and prosperous society. To that end, a qualitative approach was taken. Namely, a research process that uses an empirical approach, in order to reveal the real situation. The results showed that the certification program was not interpreted as an effort to increase competence, but rather to improve welfare.

Keywords: Competence, Certification

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah jelas menyatakan sikapnya, salah satunya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada alinea ke-4 yaitu "...Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Pernyataan tersebut jelas, bahwa sebagai negara yang merdeka maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pembangunan sumber daya manusia, dan dengan itu akan tercapai cita-cita bangsa yaitu "...berdaulat, adil dan makmur..." (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-2).

Tindak lanjut dari pernyataan tersebut secara rinci dijelaskan dalam UU no. 20 Tahun 2003 "bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global...”. Artinya, salah satu wujud nyata pemerintah di dalam menciptakan SDM yang berkualitas adalah dengan membangun sebuah pendidikan yang bermutu. Adapun sistem pendidikan berkualitas yang dimaksud adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU no. 20 Tahun 2003 Pasal 1).

Sebagaimana maksud dari pasal 1 di atas, maka jelas kata “upaya” merujuk pada salah satu komponen pendidikan yang paling penting yaitu pendidik (guru/dosen). Secara spesifik guru dijelaskan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU no.14 Tahun 2005 Pasal 1). Sebagaimana kewajiban tersebut, maka seorang guru harus memiliki standar kompetensi di antaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU no.14 Tahun 2005 Pasal 10).

Mengingat pentingnya memiliki guru berkompeten, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu sistem pengakuan kompetensi melalui Sertifikasi Pendidik. Di mana setiap pendidik akan dinyatakan berkompeten setelah melalui serangkaian pengujian yang mencakup kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (Permen no.18 Tahun 2007).

Kendati berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat guna meningkatkan mutu pendidikan, namun potret pendidikan Indonesia hari ini masih banyak catatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Komnas Ham (Kompas, 2018), setidaknya ada 4 catatan buruk pendidikan di Indonesia, di antaranya 1) Kasus pelanggaran Ham Pendidikan, tercatat pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak

11 kasus di antaranya berkaitan dengan pelanggaran mendapatkan pendidikan, pelanggaran keadilan berpendidikan (sistem zonasi), pelanggaran hak atas pengembangan potensi anak, dan pelanggaran kekerasan. 2) Peringkat pendidikan Indonesia terpuruk, data *Internasional Student Assessment* (PISA) pada tahun 2015 mencatat peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-62 dari 72 negara, bahkan Indonesia kalah telak dari Thailand, kendati anggaran pendidikan sebesar 20% atau rata-rata 400 triliun per tahunnya. 3) Besarnya anggaran pendidikan memiliki potensi besar untuk dikorupsi, data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa selama 11 tahun terakhir (2005-2016) terdapat 425 kasus korupsi pendidikan yang melibatkan kementerian dan dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru/dosen, kepala daerah dan anggota DPR/DPRD dengan total kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar. dan 4) Sistem pendidikan dan Kualitas guru yang rendah, kurikulum yang ada dipandang memberatkan peserta didik, pasalnya proses pendidikan menghabiskan waktu cukup lama yakni 7 jam – 8 jam se hari, terlebih kompetensi guru mencakup pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian belum dapat menjangkau potensi anak, al hasil pendidikan Indonesia berjalan di tempat.

Global Talent Competitiveness Index/GTCI (2019) mencatat tingkat daya saing SDM Indonesia sebesar 38,61 bertengger di urutan ke-6 di ASEAN. Sedangkan Indeks Pendidikan Indonesia menurut *Human Development Reports* (2017) sebesar 0,622 dengan peringkat ke-7 di ASEAN. UNDP mencatat indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2016 sebesar 0,689 menempati peringkat ke-113 dari 188 negara. Lebih lanjut EFA *Global Monitoring Report UNESCO* (2014) mencatat setidaknya ada 12 permasalahan yang mengakibatkan rendahnya pendidikan di Indonesia, di antaranya banyak penduduk yang tidak mengenyam sekolah dasar, kurangnya ketersediaan guru ahli dan berpengalaman, gaji guru yang rendah, belum tersedianya guru ahli bidang *science*, tidak tercapainya target pendidikan hingga masih rendahnya capaian mata pelajaran bidang *science*.

Secara spesifik kondisi di atas menuntut untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan, khususnya perbaikan kualitas tenaga pendidik. Guru atau tenaga pendidik adalah komponen utama dan paling berpengaruh terhadap prestasi anak. Baiknya guru dan atau berkualitasnya guru akan berpotensi terhadap kemungkinan baik dan berkualitasnya peserta didik. Menurut Liakopoulou (2011)

kompetensi guru itu dapat dilihat, misalnya metode belajarnya menghidupkan semangat belajar siswa, cara berkomunikasi dan interaksinya adaptif, pengetahuannya dan pengalamannya terukur dari hasil belajar siswa, dan sikap serta perilakunya menjadi teladan bagi siswa. Kulshrestha & Pandey (2013) menegaskan guru profesional atau kompeten adalah orang yang fokus pada praktek, yaitu berusaha mewujudkan pengetahuan yang dimiliki, menunjukkan hasil belajar yang baik, mencoba metode-metode baru dalam mengajar, dan mengambil risiko untuk inovasi. Kunter, et al. (2013) menjelaskan kualitas pendidikan adalah sepenuhnya tampilan dari karakteristik guru, dan sebagian kecil faktor lain.

LANDASAN TEORI

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (UU No.14 tahun 2005 Pasal 1). Dalam proses tersebut dilakukan serangkaian uji kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk menciptakan tenaga pengajar profesional, dan sebagai imbalannya diberikan sejumlah kompensasi tertentu sesuai dengan kepangkatan/golongan yang dicapai.

Oleh karena sertifikasi adalah suatu proses pengujian terhadap pengakuan kompetensi guru, maka tidak ada kata tidak bagi guru untuk membuktikan kemampuannya. McDonald, et al. (2013) mengemukakan kemampuan pedagogik guru sangat berguna dalam menghidupkan semangat belajar siswa, bahkan dapat dikatakan keberhasilan unik dari seorang guru adalah karena kemampuan mengelola kelas yang baik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program sertifikasi diharapkan dapat mendorong para guru untuk menjadi seorang pimpinan kelas yang baik, yaitu dapat mengelola pembelajaran dengan penuh semangat dan rasa optimis (Carril, Sanmamed, & Sellés, (2013). Suci & Mata (2011) menambahkan kemampuan pedagogik sangat dekat kepada keberhasilan, efisiensi, pengembangan profesional diri, dan perubahan lingkungan sosial yang positif.

Selain itu, sertifikasi menguji sejauh mana kompetensi kepribadian guru. Maksud dari hal tersebut adalah sebagai metode pendekatan bagi pembentukan karakter peserta didik. Tentu guru yang berkarakter akan memperlihatkan cara terbaik bagaimana memahami ilmu, namun ia menunjukkannya dengan sikap dan perilaku yang terpuji.

Pishghadam & Sahebjam (2012) mengemukakan mengajarkan ilmu tidaklah mudah, terlebih yang diajarkannya adalah manusia, mereka memiliki pemikiran dan perasaan. Namun bagi seseorang yang dapat mengendalikan dirinya, walau sedikit ia selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik. Secara eksplisit temuan tersebut menjelaskan, bahwa persoalan ilmu bukanlah urusan seorang guru, namun caranya mereka menunjukkan jalan yang benar adalah intinya, dan sangat sedikit dari para guru yang dapat menunjukkannya kecuali mereka yang telah memiliki kematangan jiwa (lebih tepat dikatakan sebagai guru yang bijaksana). Hakim (2015) mengemukakan, dalam mengembangkan SDM (siswa) diperlukan pendekatan karakter, karena mereka mudah menirukan sang pengajar. Lebih lanjut, Ayan & Kocacik (2010) mengemukakan kuatnya karakteristik guru dapat mempengaruhi dan bahkan merubah lingkungan belajar siswa.

Lebih lanjut, sertifikasi hendak mengukur kemampuan sosial tenaga mengajar. Dalam proses belajar mengajar sesungguhnya sedang terjadi interaksi sosial antara guru dan siswa maupun antar siswa. Oleh karena itu, interaksi di dalam belajar haruslah didasarkan pada sifat humanis, yakni sifat dasar dari sosial itu sendiri. Siswa akan merasa senang jika pribadinya diakui, dihargai, dimotivasi dan diarahkan pada suatu kebaikan. Oleh karenanya, kemampuan sosial dari seorang guru perlu diuji. Shanmugasundaram & Mohamad (2011) mengemukakan secara sederhana kemampuan guru dapat dilihat dari cara berkomunikasi, artinya diksi dan narasi yang digunakan serta ekspresi memiliki tingkat kestabilan yang baik, dan dengan itu orang merasa senang dengannya. Selvi (2010) mengemukakan keindahan dari seorang guru ketika mengajar adalah pada saat menggunakan bahasa yang baik, kata demi kata memiliki arti yang dapat dipahami serta mampu mempengaruhi emosional pendengarnya (siswa). Penjelasan tersebut tepatnya terapi pendidikan. Sangat sulit melihat guru memiliki kemampuan komunikasi yang mampu mempengaruhi emosional siswa. Tentu banyak hal yang sudah dilalui dan dipelajari sehingga setiap kata yang digunakan dalam mengajar dapat merubah cara pandang siswa menjadi lebih baik. Shaffer & Thomas-Brown (2015) menambahkan, keahlian berbicara adalah modal sosial yang penting agar dapat berinteraksi dengan baik, namun perlu banyak pengalaman dalam melihat berbagai macam perbedaan sifat dan karakter siswa. Dengan kata lain, membangun kemampuan sosial tidak mudah, butuh waktu yang lama dan kesempatan yang besar,

karena bahasa memiliki arti dan karena itu pasti memiliki ekspresi yang berbeda. Agar tidak dilihat salah dan dicemoohkan guru harus membangun mental sosial, yaitu pantang menyerah dengan kebaikan.

Hal terakhir yang hendak diuji di dalam sertifikasi adalah kemampuan profesional. Maksud dari hal tersebut adalah untuk menguji sejauh mana keilmuan seorang guru, apakah hanya sebatas tahu, cukup tahu, atau memahami implementasi dari suatu ilmu tersebut. Dengan kata lain, dalam pengujian ini seorang guru diukur kemampuan tekstual dan kontekstual dari ilmu yang dimilikinya. Morris. (2010) dan Mustafa (2013) menjelaskan kemampuan profesional membuat guru percaya diri dalam mengajarkan ilmu, dan karena itu tercipta suasana belajar yang emosional (terbangun ketertarikan siswa terhadap belajar). Kabakci (2011) dan Liakopoulou (2011) menjelaskan, kemampuan profesional adalah hal pertama yang harus dimiliki seorang pengajar. Dengan menguasai ilmu maka layak seseorang dikatakan sebagai seorang guru.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat membuktikan argumentasi di atas, maka digunakan beberapa metode di antaranya menggunakan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi deskriptif. Adapun metode turunan yang digunakannya adalah survey, di mana pelaksanaannya menyesuaikan dengan objek penelitian guna menggali informasi lebih dalam terkait fenomena yang diangkat. Objek penelitian yang digunakan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Tangerang Selatan yang terakreditasi A. Sedangkan unit analisis (koresponden) adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan (Karakteristik, Pendidikan, Status, Pengalaman, dan Kesiapan). Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara verbal, tertulis dan bersifat terstruktur. Selanjutnya cara triangulasi digunakan sebagai penguat argumentasi di dalam menjelaskan fenomena penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pada tahap pertama diajukan pertanyaan umum, yakni pertanyaan terkait dengan sertifikasi pendidik, di mana pertanyaan sertifikasi pendidik terdiri dari 4 pertanyaan besar sebagai indikator di dalam mengukur kompetensi guru yaitu Pengetahuan tentang

UU/PP/Permen Serifikasi, Syarat sertifikasi, Hak sertifikasi, Kewajiban sertifikasi. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dari 6 peraturan yang mengatur sertifikasi (UU no.20 tahun 2003, UU n0.14 tahun 2005, PP no.19 tahun 2005, Permendiknas no.16 tahun 2005, Permendiknas no.18 dan no.40 tahun 2007) hampir seluruh informan tidak mengetahui secara rinci bagaimana sertifikasi diatur. Maka tidak heran jika dalam pelaksanaannya banyak guru bersertifikat pendidik belum dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, seluruh informan sangat baik dalam memahami Syarat sertifikasi, Hak sertifikasi, dan Kewajiban sertifikasi. Temuan ini menjelaskan, bahwa lemahnya pemahaman terkait peraturan sertifikasi menjadi bukti kurangnya sosialisasi, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap sikap dan persepsi guru bersertifikat di dalam menjalankan kewajibannya. Konsekuensi yang sudah pasti adalah mengerjakan sebagai penggugur kewajiban. Tentu kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar sertifikasi sebagaimana diamanatkan dalam UU no.20 tahun 2003 dan UU n0.14 tahun 2005. Fakta membuktikan, tidak ada beda keilmuan maupun sikap dan perilaku pendidik baik yang sudah bersrtifikat pendidik ampun yang belum, hal ini yang disebut dengan kesia-siaan. Di mana anggaran sertifikasi tidak dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas guru, yang ada hanyalah pemborosan APBN, sementara di sisi lain masih banyak anak bangsa di belahan pulau lain yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan.

Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik, maka diajukan 3 pertanyaan utama dengan beberapa turunan pertanyaan di antaranya mengenai metode, kreativitas dan inovasi. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam hal metode dan kreativitas para guru cukup baik. Cukup baik yang dimaksud adalah, metode mengajar yang utama menggunakan metode ceramah, namun terkadang dikombinasikan dengan metode diskusi, partisipasi dan praktek dengan demikian para siswa tidak terlalu jenuh di dalam belajar. Sedangkan dalam hal kreativitas diakui belum banyak kemajuan, namun sesekali para guru menciptakan metode belajar yang dikemas dalam bentuk permainan (teka-teki, tebak-tebakan, hadiah, dll) dan atau menggunakan metode studi kasus yang dikemas dalam bentuk perlombaan, yang dapat menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu akan diberikan sejumlah hadiah tertentu. Namun, dalam hal inovasi, para guru belum dapat berbuat apa-apa, tidak ada yang dikembangkan atau menciptakan hal baru, mungkin ini adalah kelemahan pada hampir setiap guru, terlebih

minimnya fasilitas finansial dan daya analisa semakin mempersempit ruang guru bereksplorasi.

Untuk mengetahui kompetensi kepribadian diajukan 4 pertanyaan utama dengan beberapa turunan pertanyaan penjelas di antaranya berprinsip, berakhlak mulia, bijaksana, dan berwibawa. Hasil wawancara diperoleh informasi, bahwa para guru menyadari dalam hal sikap masih jauh dari kata berprinsip, berakhlak mulia, bijaksana, dan berwibawa. Terlebih pada kategori teladan (berakhlak mulia), para guru sejujurnya masih belum pantas disapa dengan sebutan “Bapak/Ibu Guru”. Kondisi ini menegaskan bahwa para guru sebagai agen pendidikan adalah sosok pembelajar. Oleh karenanya tidak ada kata sempurna, namun terus belajar sampai akhir hayat adalah konsekuensi moral yang harus dipenuhi. Di sisi lain, para guru menyadari perannya tidak hanya sebagai penyampai ilmu, lebih dari pada itu sebagai pendidik dan pembimbing yang sudah tentu harus berusaha memberikan contoh yang baik.

Untuk mengetahui kompetensi profesional diajukan 4 pertanyaan utama yaitu Linearitas, Menguasai materi, Literasi, dan Kontekstual. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa beban kerja guru tidak sepenuhnya linear (sesuai) dengan keilmuan yang dimiliki, sedangkan pada bagian menguasai materi diakui cukup menguasai terutama pada mata pelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya, namun para guru mengakui dalam hal literasi masih perlu banyak membaca buku dan masih harus mencari contoh-contoh penerapan ilmu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dari keempat indikator tersebut, diakui kontekstual adalah kelemahan utama guru. Minimnya pengalaman dan referensi menjadi kendala utama di dalam menguraikan suatu pembahasan ilmu.

Untuk mengetahui kompetensi sosial diajukan dua pertanyaan utama yaitu komunikasi, Interaksi. Adapun yang dimaksud komunikasi adalah diksi, narasi dan ekspresi yang digunakan guru dalam berkomunikasi dengan para siswa. Sedangkan interaksi mencakup keterbukaan, ramah, dan mudah beradaptasi (penyesuaian diri). Hasil wawancara diperoleh temuan bahwa para guru sangat sosialis, artinya para guru menyadari profesinya menuntut untuk berbicara lemah lembut, santun, tata bahasanya baik, dan sistematis disertai ekspresi sikap yang ramah dan responsif dengan demikian akan terbangun hubungan kekeluargaan di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Hasil analisis mengemukakan temuan, berdasarkan peraturan sertifikasi para guru belum dapat dikatakan sebagai guru yang kompeten dan profesional, meski sudah bersrtifikasi. Hal tersebut terbukti dengan lemahnya pengetahuan guru terhadap peraturan-peraturan sertifikasi dan faktanya pelaksanaan tugas baru sebatas menggugurkan kewajiban. Fakta lain yang memperkuat kesimpulan di atas adalah bahwa para guru menyadari masih lema dalam hal inovasi pembelajaran, linearitas, literasi, kontekstual dan kepribadian yang soleh.

Temuan di atas mengemukakan; 1) perlu dilakukan supervisi dan evaluasi. 2) sosialisasi dan pendampingan. 3) pendidikan dan pelatihan. dan 4) timbal balik. Artinya ke-empat rekomendasi di atas dapat maksimal jika segenap elemen saling berkolaborasi. Maksudnya adalah setiap guru memahami profesinya adalah pendidik maka ia harus cerdas, menyenangkan dan menjadi teladan. Begitu pula lembaga pendidikan harus menciptakan sistem yang mendukung lahirnya sikap profesionalitas guru. Kemudian Kementerian dan Dinas Pendidikan menyediakan fasilitas untuk berpendidikan dan mengikuti pelatihan. Sedangkan pemerintah pusat menyediakan anggaran dengan struktur sistem pelaksanaan yang kokoh, yakni sistem yang mendorong lahirnya ke-4 kompetensi dasar (pedagogik, kepribadian, profesional, sosial) yang dibantu pengawasannya oleh anggota DPR guna tercipta efektivitas dan efisiensi (cara yang bijak untuk terciptanya masyarakat cerdas dan sejahtera).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayan, S., & Kocacik, F. (2010). The relation between the level of job satisfaction and types of personality in high school teachers. *Australian Journal of Teacher Education*, 35(1), 26-41.
- Carril, P. C. M., Sanmamed, M. G., & Sellés, N. H. (2013). Pedagogical roles and competencies of university teachers practicing in the e-learning environment. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 14(3), 462-487.
- Elizabeth, C. L. M., May, C. M. H., & Chee, P. K. (2008). Building a model to define the concept of teacher success in Hong Kong. *Teaching and teacher education*, 24(3), 623-634.
- Hakim, A. (2015). Contribution of competence teacher (pedagogical, personality, professional competence and social) on the performance of learning. *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, 4(2), 1-12.

- Kabakci Yurdakul, I. (2011). An Evaluative Case Study on Professional Competency of Preservice Information Technology Teachers. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 10(3), 33-53.
- Koswara, K., & Rasto, R. (2016). Kompetensi dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi. *Jurnal pendidikan manajemen perkantoran*, 1(1), 61-71.
- Kulshrestha, A. K., & Pandey, K. (2013). Teachers training and professional competencies. *Voice of Research*, 1(4), 29-33.
- Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional quality and student development. *Journal of Educational Psychology*, 105(3), 805.
- Liakopoulou, M. (2011). The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher's effectiveness. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(21), 66-78.
- Liakopoulou, M. (2011). The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher's effectiveness. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(21), 66-78.
- McDonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. *Journal of Teacher Education*, 64(5), 378-386.
- Morris, D. (2010). Are teachers technophobes? Investigating professional competency in the use of ICT to support teaching and learning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 4010-4015.
- Mustafa, M. N. (2013). Professional Competency Differences among High School Teachers in Indonesia. *International Education Studies*, 6(9), 83-92.
- Pishghadam, R., & Sahebjam, S. (2012). Personality and emotional intelligence in teacher burnout. *The Spanish journal of psychology*, 15(1), 227-236.
- Selvi, K. (2010). Teachers' competencies. *Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*, 7(1), 167-175.
- Shaffer, L., & Thomas-Brown, K. (2015). Enhancing teacher competency through co-teaching and embedded professional development. *Journal of Education and Training Studies*, 3(3), 117-125.
- Shanmugasundaram, U., & Mohamad, A. R. (2011). Social and emotional competency of beginning teachers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 29, 1788-1796.
- Suciu, A. I., & Mata, L. (2011). Pedagogical Competences-The Key to Efficient Education. *International online journal of educational sciences*, 3(2), 411-423.
- Mulyani, F. (2017). Konsep Kompetensi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 3(1), 1-8.
- Suprastowo, P. (2013). Kajian Tentang Tingkat ketidakhadiran guru sekolah dasar dan Dampaknya terhadap Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(1), 31-49.